

**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : SP DIPA- 135.04.2.692060/2026**

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026

Revisi ke 02
Tanggal : 11 Februari 2026

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- 1. Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
- 2. Unit Organisasi : (04) DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
- 3. Provinsi : (24) NUSA TENGGARA TIMUR
- 4. Kode>Nama Satker : (692060) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM NUSA TENGGARA TIMUR
- Sebesar : Rp. 1.419.162.000 (SATU MILIAR EMPAT RATUS SEMBILAN BELAS JUTA SERATUS ENAM PULUH DUA RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

- 03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
- 03.03 PEMBINAAN HUKUM

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

- 135.04.BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum
- 135.04.BF.7110 Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah

Jumlah Uang

Rp. 1.419.162.000
Rp. 1.419.162.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

- | | | | | | |
|-------------------------------|-----|---------------|--------------------------------|-----|---|
| 1. Rupiah Murni | Rp. | 0 | 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| 2. PNB | Rp. | | - Pinjaman Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| - PNB TA Berjalan | Rp. | 1.419.162.000 | - Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| | | | 5. Hibah Langsung | Rp. | 0 |
| 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Luar Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Pinjaman Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | 6. SBSN PBS | Rp. | 0 |

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

- 1. KPPN K U P A N G (039) Rp. 1.419.162.000

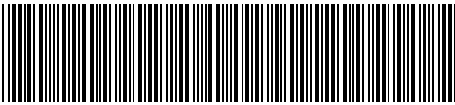
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

- 1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
- 2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
- 3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- 4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
- 5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- 6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
- 7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

Jakarta, 01 Desember 2025
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.04.2.692060/2026
I A. INFORMASI KINERJA



DS:5461-4836-9144-5189

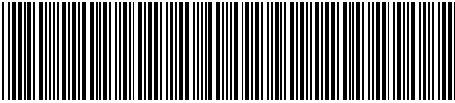
Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (04) DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Provinsi : (24) NUSA TENGGARA TIMUR
Kode>Nama Satker : (692060) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM NUSA TENGGARA TIMUR

										Halaman : I A. 1
Program	:	135.04.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum							1.419.162.000
Kegiatan	:	7110	Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah							1.419.162.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:									
Klasifikasi Rincian Output	1	:	7110.BAH	Pelayanan Publik Lainnya				4,00	layanan	451.077.000
Rincian Output	:	01	BAH.001	Layanan Administrasi Hukum Umum di Wilayah				4,00	layanan	451.077.000
Klasifikasi Rincian Output	2	:	7110.BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga				6,00	Lembaga	961.215.000
Rincian Output	:	01	BIC.001	Pengawasan Kenotariatan oleh Majelis Pengawas di Wilayah				6,00	Lembaga	961.215.000
Klasifikasi Rincian Output	3	:	7110.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan				1,00	Laporan, Layanan	6.870.000
Rincian Output	:	01	FAE.001	Pemantauan dan Evaluasi Layanan AHU di Wilayah				1,00	Laporan	6.870.000

Jakarta, 01 Desember 2025
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

ttd.
WIDODO

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.04.2.692060/2026
I B. SUMBER DANA



DS:5461-4836-9144-5189

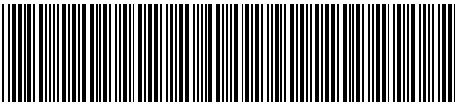
Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (04) DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Provinsi : (24) NUSA TENGGARA TIMUR
Kode>Nama Satker : (692060) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM NUSA TENGGARA TIMUR

						Pagu	Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2026	Rp.	1.419.162.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
1. Rupiah Murni	Rp.	0		(2) RPLN	US\$	0	Rp.	0
2. PNPB	Rp.			b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0	Rp.	0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0		
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0		
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0		
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0		

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.04.2.692060/2026
II. RINCIAN PENGELUARAN



DS:5461-4836-9144-5189

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (04) DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Provinsi : (24) NUSA TENGGARA TIMUR
Kode>Nama Satker : (692060) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM NUSA TENGGARA TIMUR
Kewenangan : (KD)

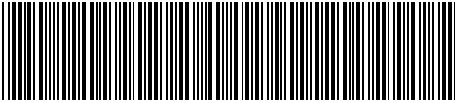
Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
692060	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM NUSA TENGGARA TIMUR	-	1.419.162	-	-	-	1.419.162	24 . 51 039@ 039@ 24 . 51 039@	
135.04.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	-	1.419.162	-	-	-	1.419.162		
7110	Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	-	1.419.162	-	-	-	1.419.162		
7110.BAH	Pelayanan Publik Lainnya (24.51 NUSA TENGGARA TIMUR / KOTA KUPANG)	-	451.077	-	-	-	451.077		
04	PNBP	-	451.077	-	-	-	451.077		
7110.BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga (24.51 NUSA TENGGARA TIMUR / KOTA KUPANG)	-	961.215	-	-	-	961.215		
04	PNBP	-	961.215	-	-	-	961.215		
7110.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan (24.51 NUSA TENGGARA TIMUR / KOTA KUPANG)	-	6.870	-	-	-	6.870		
04	PNBP	-	6.870	-	-	-	6.870		
JUMLAH		-	1.419.162	-	-	-	1.419.162		

Jakarta, 01 Desember 2025
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

ttd.
WIDODO

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.04.2.692060/2026
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN



DS:5461-4836-9144-5189

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (04) DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Provinsi : (24) NUSA TENGGARA TIMUR
Kode>Nama Satker : (692060) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM NUSA TENGGARA TIMUR

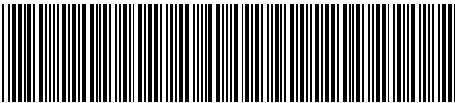
Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	692060	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM NUSA TENGGARA TIMUR													
		RENCANA PENARIKAN DANA	0	58.494	110.914	132.672	140.350	107.302	60.277	74.238	311.112	63.113	26.795	333.896	1.419.162
		BELANJA BARANG	0	58.494	110.914	132.672	140.350	107.302	60.277	74.238	311.112	63.113	26.795	333.896	1.419.162
		Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	0	58.494	110.914	132.672	140.350	107.302	60.277	74.238	311.112	63.113	26.795	333.896	1.419.162
	135.04.BF.7110	52 BELANJA BARANG DAN JASA	0	58.494	110.914	132.672	140.350	107.302	60.277	74.238	311.112	63.113	26.795	333.896	1.419.162

Jakarta, 01 Desember 2025
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

ttd.
WIDODO

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.04.2.692060/2026
IV A. B L O K I R



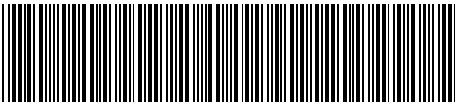
DS:5461-4836-9144-5189

Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [04] DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Provinsi : [24] NUSA TENGGARA TIMUR
Kode dan Nama Satker : [692060] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM NUSA TENGGARA TIMUR

Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
692060	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM NUSA TENGGARA TIMUR		Prioritas Direktif Presiden TA 2026
	Jumlah Dana yang tidak dapat dicairkan Rp. 590.285	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	52 Belanja Barang Rp. 590.285	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(PNBP)
135.04.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 2.678
7110	Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah		Prioritas Direktif Presiden TA 2026
7110.BAH	Pelayanan Publik Lainnya	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	521211 Belanja Bahan(PNBP)	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(PNBP)
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 28.432		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 39.972
	Prioritas Direktif Presiden TA 2026		Prioritas Direktif Presiden TA 2026
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
521213	Belanja Honor Output Kegiatan(PNBP)		Pengawasan dan Pengendalian Lembaga
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 3.100	521211	Belanja Bahan(PNBP)
	Prioritas Direktif Presiden TA 2026		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 14.743
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Prioritas Direktif Presiden TA 2026
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya(PNBP)	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.200	521213	Belanja Honor Output Kegiatan(PNBP)
	Prioritas Direktif Presiden TA 2026		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 290.700
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Prioritas Direktif Presiden TA 2026
522151	Belanja Jasa Profesi(PNBP)	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 4.020	522141	Belanja Sewa(PNBP)
	Prioritas Direktif Presiden TA 2026		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 960
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Prioritas Direktif Presiden TA 2026
522191	Belanja Jasa Lainnya(PNBP)	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 41.700	522151	Belanja Jasa Profesi(PNBP)
	Prioritas Direktif Presiden TA 2026		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.830
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Prioritas Direktif Presiden TA 2026
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP)	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 39.079	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP)

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.04.2.692060/2026
IV A. B L O K I R



DS:5461-4836-9144-5189

Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [04] DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Provinsi : [24] NUSA TENGGARA TIMUR
Kode dan Nama Satker : [692060] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM NUSA TENGGARA TIMUR

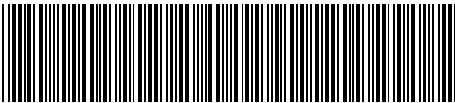
Halaman : IV.A. 2
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
7110.FAE	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 57.883 Prioritas Direktif Presiden TA 2026 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.260 Prioritas Direktif Presiden TA 2026 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 60.278 Prioritas Direktif Presiden TA 2026 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan		
	521211 Belanja Bahan(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 150 Prioritas Direktif Presiden TA 2026 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 2.142 Prioritas Direktif Presiden TA 2026 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 158 Prioritas Direktif Presiden TA 2026 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		

Jakarta, 01 Desember 2025
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

ttd.
WIDODO

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.04.2.692060/2026
IV B. C A T A T A N



DS:5461-4836-9144-5189

Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [04] DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Provinsi : [24] NUSA TENGGARA TIMUR
Kode dan Nama Satker : [692060] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM NUSA TENGGARA TIMUR

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 01 Desember 2025
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

ttd.
WIDODO